LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 serta dokumen Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini, adalah sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Nganjuk, Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

Bab I **Pendahuluan**..... 1

a. Gambaran Umum/Latar Belakang..... 1

b. Landasan Hukum..... 2

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi..... 3

d. Isu-isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi 9

e. Sistematika Penulisan.....10

Bab II **Perencanaan Kinerja**.....12

a. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja.....12

b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan.....15

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**..... 17

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 17

B. Realisai Anggaran..... 52

Bab IV **Penutup** 64

BAB I

PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum/Latar Belakang

Dalam mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; Pengumpulan Data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) merupakan tahapan terakhir dalam Sistem Akuntabilitas Pemerintah

b. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

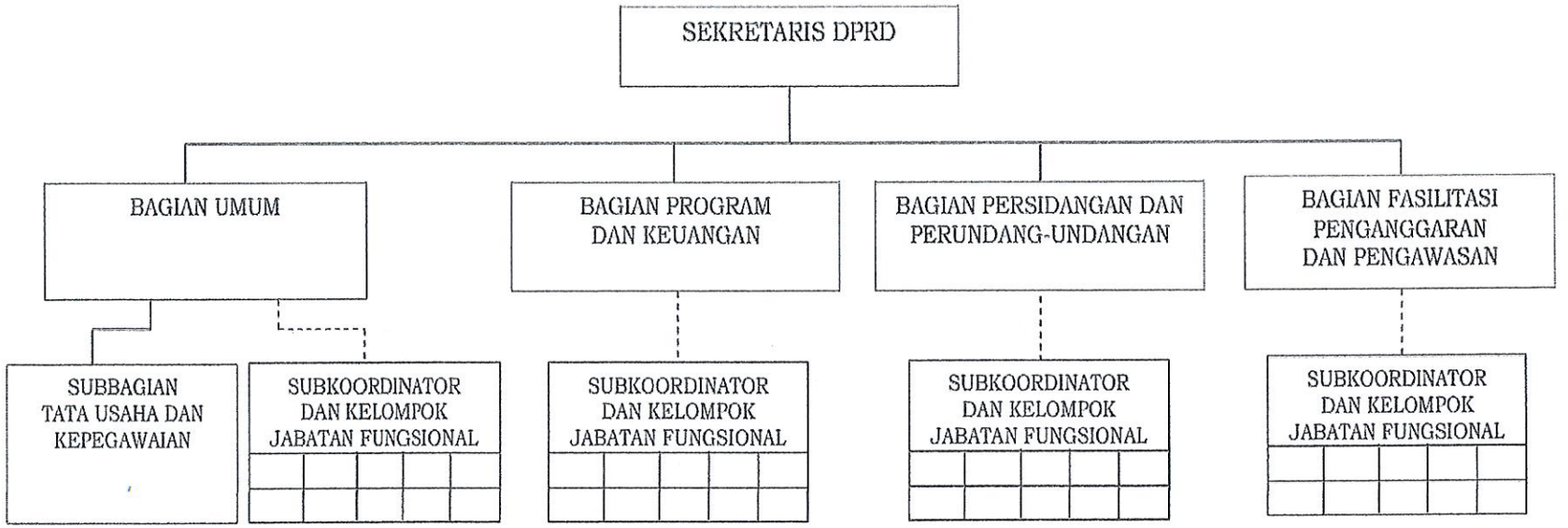
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai kedudukan yang strategis yakni Unit pelayanan kepada Lembaga Legislatif daerah yang merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Sekretariat DPRD digambarkan sebagai berikut :

Peraturan Bupati Nganjuk No. 06 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Nganjuk

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK



c.1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretriat DPRD Kabupaten Nganjuk pada Tahuan adalah 21 orang. Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah :

Tabel I.A.1

Data Administrasi Kepegawaian

Menurut Golongan dan Jabatan

U R A I A N	Satuan	Jumlah
a. Jumlah ASN		
1) Golongan I	Orang	0
2) Golongan II	Orang	4
3) Golongan III	Orang	13
4) Golongan IV	Orang	3
5) PPPK	Orang	1
Jumlah	**Orang**	**21**
b. Jumlah Pejabat Struktural		
1) Eselon II	Orang	1
2) Eselon III	Orang	2
3) Eselon IV/Sub Koordinator	Orang	5
c. Jumlah Staf ASN	Orang	13
Jumlah	**Orang**	**21**

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui adalah :

Tabel I.A.2.

Data Administrasi Menurut Tingkat Pendidikan

No	U R A I A N	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	5
4	Lulusan D2	Orang	-

No	U R A I A N	Satuan	Jumlah
5	Lulusan D3	Orang	1
6	Lulusan S-1/D4	Orang	6
7	Lulusan Pasca Sarjana / S-2	Orang	9
8	Lulusan Pasca Sarjana / S-3	Orang	-
Jumlah		**Orang**	**21**

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tenaga Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS pada tahun 2024 sebanyak 21 orang.

c.2. Tugas dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

2. Fungsi

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 dan diubah terakhir Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
b. melaksanakan kearsipan dan perpustakaan;
c. menyusun administrasi kepegawaian;
d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
h. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD;
i. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Sekretariat DPRD; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Program dan Keuangan Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD. Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
b. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
c. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
d. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
h. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
i. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
j. pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
k. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
l. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
m. pelaksanaan analisis laporan kinerja sekretariat DPRD; pelaksanaan analisis laporan keuangan sekretariat DPRD; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persidangan serta menyusun produk hukum daerah sesuai kewenangan DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif;
d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan; e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
f. penyusunan risalah rapat;
g. pelaksanaan koordinasi pembahasan Raperda;
h. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
j. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
k. penyelenggaraan publikasi;
l. penyelenggaraan keprotokolan;
m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Sekretaris DPRD;
n. pelaksanaan fasilitasi penerimaan tamu; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBDP;
c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

d. ISU STRATEGIS *(Strategic issued)* yang sedang dihadapi Organisasi

Isu Strategis pada Sekretariat DPRD yaiut Perlunya Peningkatan Kompetensi Sumber daya aparatur dan dukungan Sarana prasarana dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD merupak Unsur Pendukung Pemeritah Daerah yang memiliki Fungsi Pelayanan terhadap DPRD, maka dalam Evaluasi Kinerja Sekretariat

DPRD mengacu pada Tujuan Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". dan Sasaran " Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD" serta memiliki indikator kinerja dalam pengukuran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD Maksud dari penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk secara manajerial kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan :

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
2. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
4. Merupakan media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

e. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

a. Gambaran Umum/Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
d. Isu-isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi
e. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

a. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisai Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Sasaran, Tujuan, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
2. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 ini antara lain adalah :

1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
2. Untuk pedoman tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;

3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk berikutnya.

Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83	Nilai

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD	83	Nilai

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	83	Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PelayananBagian Program dan Keuangan	83	Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	83	Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	83	Nilai
		Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintahan (SAKIP)	80,20	Nilai
		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	Persen

b. Perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Nganjuk dan Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD	83

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 41.498.155.508	APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 31.463.145.700	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam Bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran Tahun 2024.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

No.	Sasaran	Indikator	Formula Hitungan Capaian Target	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan DPRD terhadap	83

No.	Sasaran	Indikator	Formula Hitungan Capaian Target	Target
	DPRD	(IKM) pelayanan Sekretariat DPRD	pelayanan Sekretariat DPRD	

Pengukuran Sasaran Kinerja dengan Survey terhadap Penerima Layanan / Masyarakat melalui E-Sukma dengan memperhatikan 9 Unsur yaitu :

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk layanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya

suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (n)

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk. Pencapaian kinerja terhadap sasaran-sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD	83	86,22	103,87

Analisa terhadap pencapaian sasaran meningkatkanya kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD diukur dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, merupakan indikator yang menggambarkan upaya Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan meningkatkan dukungan bagi kapasitas kinerja DPRD, Dari Aplikasi Sukma E-Jatim di Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk didapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 86,22. Angka yang berarti Kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk kepada Masyarakat/Pengguna layana Berkinerja Pelayanan "Baik". Hal Ini Menunjukan bahwa Kinerja Secara umum dalam kategori Baik.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja			
			n-3	n-2	n-1	n	n-3	n-2	n-1	n
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik	83	80,25	83,95	87,26	86,22

Masyarakat (IKM) Pelayanan Sekretariat DPRD dengan cara didapat dari E-SUKMA dengan hasil 86,22 dengan kategori Baik telah memenuhi target, dengan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan disiplin Pegawai.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	103,55	92,28	11,27

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD	103,87	92,28	11,59

Tingkat Efisiensi Sasaran Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD terdapat efisiensi dengan Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 11,59 % hal ini dikarenakan :

1. Dalam Pelayanan DPRD khususnya dalam peningkatan Kapasitas DPRD atau Pengawasan yang dilakukan DPRD dengan melakukan Kunjungan kerja/Study Banding, Konsultasi dan Koordinasi adanya Pergeseran Tempat Kegiatan sehingga menefisiensi Anggaran selain itu juga tidak berlakunya Perpres 53 Tahun 2023 yang bersifat lumpsum untuk Penginapan dan Transportasi DPRD Kembali ke Perpres 33 Tahun 2023 yang bersifat atcost untuk Penginapan dan Transportasi DPRD;
2. Terjadi Efesiensi Anggaran dikarenakan pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas Pelaksanaan Menyesuaikan Undangan Bimtek Partai dan Jadwal dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang disediakan untuk memfasilitasi Pimpinan DPRD akan tetapi Pimpinan DPRD banyak mengikuti Kegiatan Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD bersama Anggota.

4. Adanya masa transisi Anggota DPRD Periode 2019-2024 ke Anggota DPRD Periode 2024-2029 menyebabkan keterlambatan dalam pembentukan AKD sehingga terdapat Kegiatan yang tidak terserap dikarenakan oleh waktu seperti contoh pembentukan pansus dan Penyusunan Kajian/NA.

Terdapat Perubahan Anggaran dari 72.961.301.208 menjadi 79.561.301.135 bertambah 6.599.999.927, hal ini guna mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatatertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota yaitu dari Segi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum	83	84,98	102,39%
				Nilai Sakip	80,25	80,6	100,44%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan	83	87,95	105,96%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	50	100,00%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100,00%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	74	74	100,00%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	22	88,00%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100,00%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	24	100,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	6	100,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100,00%
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	100,00%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Aturan Yang Berlaku	8	8	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	25	96,15%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum	100	100	100,00%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	100,00%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	100,00%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	80	100,00%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	20	100,00%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	30	100,00%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	32	100,00%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	100,00%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	13	13	100,00%
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	4	100,00%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	100,00%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	80	100,00%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	100,00%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	36	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	50	100,00%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	100,00%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	40	100,00%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	140	100,00%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50	50	100,00%
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	100,00%
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	6	100,00%
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	39	78,00%
			Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	24	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	24	100,00%
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100,00%
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	83	86,51	104,23%
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	83	86,92	104,72%
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang Disusun	6	13	216,67%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	100,00%
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6	- 13	216,67%
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2	0	0,00%
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	2	50,00%
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggran	20	20	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	100,00%
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	100,00%
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	100,00%
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	100,00%
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	120	120	100,00%
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14	14	100,00%
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14	14	100,00%
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14	14	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14	14	100,00%
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	13	13	100,00%
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	100,00%
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah DPRD yang Kapasitasnya Ditingkatkan	50	50	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4	100,00%
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	6	100,00%
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	7	100,00%
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	2	100,00%
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2	1	50,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	52	52	100,00%
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyarapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20	20	100,00%
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	7	58,33%
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	2	100,00%
			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	13	13	100,00%
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	13	13	100,00%
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	12	12	100,00%
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4	4	100,00%
			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan yang Memfasilitasi Tugas DPRD	53	53	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13	13	100,00%
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	36	100,00%

Sekretariat DPRD terdapat 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan Analisis Indikator sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum dengan target Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja dengan nilai 84,98, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Program dan Keuangan dengan target Nilai 83 dengan Kinerja dengan Nilai 87,95, serta Nilai SAKIP dengan target 80,60 dengan Kategori A. Adapun catatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum Perlunya Peningkatan Kebersihan utamanya Kamar Mandi (Toilet) terkadang air kotor, serta untuk mengawasi kedisiplinan pegawai.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat Indikator 3 Indikator yaitu Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target Kinerja 100%, dengan realisasi kinerja dengan Nilai 100%, dikarenakan dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk seluruhnya terfasilitasi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DPRD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dengan Target Kinerja Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja 86,51 , serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan target Nilai 83 dengan Realisasi Kinerja 86,92.

Berkait dengan Informasi Output Kegiatan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Output
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, Laporan Kinerja, LKjIP, LKPD, LPPD, Laporan Tribulan dan SAKIP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan TPP ASN, Penatausahaan Keuangan, Laporan Akhir Tahun, Laporan Realisasi Anggaran (Fungsional), Laporan Prognosis, Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kompetensi ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor, Cetak dan

No	Program/Kegiatan	Output
		Penggadaan, Bahan Bacaan (Buku dan Koran Majalah), Makanan dan Minuman Tamu, serta Koordinasi, Konsultasi dan Study Banding Sekretariat DPRD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Peralatan Mesin (Komputer, Laptop dsb)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Gaji dan Tunjangan DPRD, Medical Cek Up dan Pengadaan Pakaian Dinas DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Makan dan Minum untuk Rapat-rapat DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Raperda sampai dengan menjadi Perda
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kegiatan memfasilitasi Pembahasan Anggaran (KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS, P APBD, APBD dan Pertanggungjawaban APBD)
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Pengawasan Komisi, Banggar dan Pansus LKPJ

No	Program/Kegiatan	Output
		(Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja)
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bimtek DPRD, Sosialisasi Perda DPRD, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli, Publikasi kegiatan DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jaring Aspirasi Masyarakat menjadi Pokok-pokok Pikiran DPRD
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kegiatan Badan Kehormatan DPRD (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja)
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Bahan Komunikasi dan Publikasi berupa Upload Media Sosial dan papan Informasi
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kegiatan Badan Musyawarah dan Pimpinan DPRD (Konsultasi, Koordinasi dan Kunjungan Kerja

Realisasi Anggaran

Selain pertanggungjawaban kinerja utama, maka perlu kiranya dilihat sejauh mana penganggaran untuk membiayai laksanaan program/kegiatan tersebut. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun ggaran 2024 dibiayai dengan anggaran APBD Tahun 2024. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten njuk Tahun Anggaran 2024 secara garis besar terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran

de rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**40.997.787.055**	**39.821.222.093**	**97,13%**
2	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**121.615.250**	**121.169.000**	**99,63%**
1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	32.888.300	32.793.000	99,71%
1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.278.900	8.211.000	99,18%

ode rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.914.900	6.896.000	99,73%
1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.986.000	4.909.000	98,46%
1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.986.600	4.937.000	99,01%
1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.897.500	4.858.000	99,19%
1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**149.597.000**	**138.938.729**	**92,88%**
1	2.05	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.597.000	138.938.729	92,88%
1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**899.109.188**	**854.471.478**	**95,04%**
1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.908.746	19.370.610	97,30%
.	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.798.196	70.540.000	99,64%

de rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.832.018	23.441.364	98,36%
1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.942.928	205.449.130	96,94%
1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	217.336.800	212.182.800	97,63%
1	2.06	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.350.000	38.392.000	82,83%
1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.577.500	92.045.250	88,87%
1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.898.000	175.600.824	93,46%
1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.465.000	17.449.500	99,91%
1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.919.696.370**	**2.878.190.000**	**98,58%**
1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.664.000.000	2.625.500.000	98,55%

ode rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
1	2.07	5	Pengadaan Mebel	-	-	-
1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.696.370	252.690.000	98,82%
1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.763.592.000**	**1.717.128.931**	**97,37%**
1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000	1.986.000	99,70%
1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	308.600.000	282.391.821	91,51%
1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.453.000.000	1.432.751.110	98,61%
1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.868.949.800**	**1.787.255.607**	**95,63%**
1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322.753.300	259.200.471	80,31%
1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.787.300	167.280.920	93,04%

de rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	55.500.000	55.300.200	99,64%
1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.170.000	69.649.945	96,51%
1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.238.739.200	1.235.824.071	99,76%
1	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**28.700.166.848**	**28.229.608.789**	**98,36%**
1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	28.282.391.848	27.881.168.789	98,58%
1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	330.275.000	311.250.000	94,24%
1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	87.500.000	37.190.000	42,50%
1	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	**973.689.800**	**917.785.654**	**94,26%**
1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	973.689.800	917.785.654	94,26%

de rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**38.563.514.080**	**33.595.016.447**	**87,12%**
2	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**4.145.509.000**	**3.092.616.544**	**74,60%**
2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	278.263.000	240.964.500	86,60%
2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.821.151.000	1.229.509.500	67,51%
2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	73.057.000	-	0,00%
2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.973.038.000	1.622.142.544	82,22%
2	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**32.572.800**	**27.892.000**	**85,63%**

de rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	8.325.000	5.570.000	66,91%
2	2.01	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8.011.800	7.850.000	97,98%
2	2.01	3	Pembahasan APBD	6.336.000	6.216.000	98,11%
2	2.01	4	Pembahasan APBD Perubahan	5.190.000	3.754.000	72,33%
2	2.01	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.710.000	4.502.000	95,58%
2	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**10.220.069.980**	**8.347.238.978**	**81,67%**
2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.613.634.000	1.273.668.879	78,93%
2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.176.973.000	1.755.162.297	80,62%
2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.792.416.000	1.371.603.237	76,52%

de rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.491.240.500	1.138.123.146	76,32%
2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.652.729.480	2.316.791.749	87,34%
2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	493.077.000	491.889.670	99,76%
2	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**16.018.076.200**	**15.290.788.898**	**95,46%**
2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	2.007.719.000	1.535.230.580	76,47%
2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	108.873.000	83.362.500	76,57%
2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	312.754.400	287.493.308	91,92%
2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	11.508.000	11.501.000	99,94%
2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	33.161.800	32.640.800	98,43%

de rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	13.544.060.000	13.340.560.710	98,50%
2	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**2.108.596.100**	**2.057.816.350**	**97,59%**
2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	9.750.000	3.750.000	38,46%
2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	46.275.200	44.876.450	96,98%
2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	2.052.570.900	2.009.189.900	97,89%
2	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**957.381.000**	**764.856.065**	**79,89%**
2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	957.381.000	764.856.065	79,89%
2	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**10.315.000**	**10.312.500**	**99,98%**
2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	10.315.000	10.312.500	99,98%

de rekening			Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
1			2	3	4	5
2	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**5.070.994.000**	**4.003.495.112**	**78,95%**
2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.682.584.000	2.293.911.500	85,51%
2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.388.410.000	1.709.583.612	71,58%
				79.561.301.135	**73.416.238.540**	**92,28%**

Jika dilihat dari komposisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk pada serapan anggaran telah merealisasikan serapan anggaran hingga mencapai 92,28 %. Kondisi serapan ini sangat dipengaruhi oleh realisasi anggaran pada Kedua Program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kedepannya sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan, Sekretariat DPRD akan lebih mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD yang antara lain :

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang;
2. Melakukan Perencanaan yang benar benar dibutuhkan guna mendukung Tupoksi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk serta disesuaikan dengan Rencana Kerja DPRD;
3. Lebih Optimal dalam menentukan dan Pencapaian Target Kinerja;
4. Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam DPRD menyusun rencana kerja dan penjadwalan kegiatan-kegiatan DPRD;
5. Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli dalam pembahasan-pembahasan raperda oleh DPRD baik raperda yang diusulkan oleh eksekutif maupun raperda inisiatif DPRD.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada sistem akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *goodgovernance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan sebagai berikut :

1. ***Indikator Tujuan*** *: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, capaian kinerja mencapai* 85,95 *dalam kategori baik.*
2. ***Indikator Sasaran*** *: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD capaian kinerja mencapai* 86,22 *dalam kategori baik.*

Sejalan dengan pencapaian kinerja kegiatan, capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dengan tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 92,28 %.

Sesuai hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja kegiatan dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan kebijakan selama Tahun Anggaran 2024, dalam penetapan perencanaan kegiatan kedepan seluruh elemen di Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk akan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut :

1. ***Indikator Tujuan*** *: Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu :*

a. Peningkatan Pelayanan terhadap Tugas Pokok Fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020;
b. Peningkatan pemberian Layanan berupa Administrasi dan Keuangan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
c. Meningkatkan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. ***Indikator Sasaran*** *: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu :*

a. Peningkatan kompetensi SDM aparatur untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana;
c. Meningkatkan Optimalisasi Adminitrasi yang bersifat Pelayanan.

Sehingga dapat tercapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang berarti bagi kemajuan dan peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan daerah.

Nganjuk, Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns. M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004